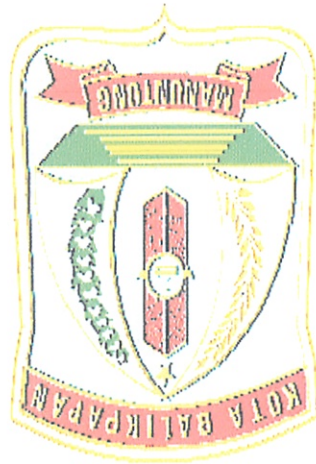




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K J I P )**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN  
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
BAB I	PENDAHULUAN
A.	LANDASAN HUKUM.....1
B.	DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI.....1
C.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....1
D.	ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....7
E.	PERMASALAHAN UTAMA.....8
F.	STRUKTUR ORGANISASI.....8
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A.	RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
1.	VISI DAN MISI.....11
2.	TUJUAN DAN SASARAN.....13
B.	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016.....14
C.	KEBIJAKAN KECAMATAN.....16
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....17
B.	REALISASI ANGGARAN.....30
BAB IV	PENUTUP
A.	KESIMPULAN.....32
B.	SARAN.....32



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan ke arah transparansi dan pelayanan masyarakat yang partisipatif dan akuntabel yang bermuara pada meningkatnya peran dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya, maka Pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan salah satu kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan dan menjawab perubahan paradigma tersebut.

Menyadari itu semua dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kota Balikpapan bahwa untuk melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel perlu didukung Rencana Kerja yang berbasis kinerja. Hal tersebut didasari oleh Dokumen Rencana Strategi Kecamatan Balikpapan Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2018, ini merupakan serangkaian program dan kegiatan telah tertuangkan pada Rencana Kerja Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan dan telah dilaksanakan pada Kantor Kecamatan Balikpapan Kota dalam mewujudkan masyarakat Kecamatan Balikpapan Kota yang sejahtera.

Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2018 ini, diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Pemerintah Kecamatan Balikpapan Kota untuk mendukung terciptanya "Good Governance" atau Pemerintahan yang baik. Yang akhirnya bermuara pada terselenggaranya urusan pemerintahan, terciptanya iklim berusaha dan berinvestasi dalam masyarakat dan terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillah rabbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Yang Mahakuasa,

kantor kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik. Dalam LKJIP ini menyajikan keseluruhan kegiatan Kantor Kecamatan Balikpapan Kota yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017. Diharapkan dengan adanya LKJIP ini, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Balikpapan Kota sesuai dengan program kerja yang ada mengarah pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penguatan Akuntabilitas merupakan salah satu dari perubahan reformasi birokrasi yang dilaksanakan di Pemerintahan Kota Balikpapan, untuk menyelesaikan laporan kinerja Tahunan Instansi Pemerintahan Kota (LAKIP) Tahun 2018. Dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kota, maka telah disusun sesuai Rencana Kerja guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program / kegiatan APBD 2018. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kantor Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2017 ini kami ucapkan terimakasih.

Balikpapan, Februari 2018

CAMAT BALIKPAPAN KOTA

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
G. LANDASAN HUKUM .....	1
H. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI .....	1
I. TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	1
J. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI .....	7
K. PERMASALAHAN UTAMA .....	8
L. STRUKTUR ORGANISASI .....	8
<b>BAB II</b>	
D. RENCANA STRATEGI (RENSTRA)	
3. VISI DAN MISI .....	11
4. TUJUAN DAN SASARAN .....	13
E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 .....	14
F. KEBIJAKAN KECAMATAN .....	16
<b>BAB III</b>	
AKUNTABILITAS KINERJA	
C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	17
D. REALISASI ANGGARAN .....	30
<b>BAB IV</b>	
PENUTUP	
C. KESIMPULAN .....	32
D. SARAN .....	32



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Landasan Hukum

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011 - 2016;

5. Peraturan Walikota No. 25 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Balikpapan.

### B. Dasar Pembentukan Organisasi

Kecamatan Balikpapan Kota dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomo 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kecamatan Kota Balikpapan. Kecamatan Balikpapan Kota terdiri dari 5 (Lima) Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Prapatan;
2. Kelurahan Telaga Sari;
3. Kelurahan Klandasan Ulu;
4. Kelurahan Klandasan Ilir;
5. Kelurahan Damai

Secara administrative luas Kecamatan Balikpapan Kota menurut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-325/2012 tentang Petunjuk Penetapan Luas dan Batas Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Pemekaran dalam Wilayah Kota Balikpapan adalah 10.218 km<sup>2</sup>.





### C. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Balikpapan Kota

#### 1) Tugas Pokok

##### a. Camat

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

##### b. Sekretaris

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, administrasi pegawai, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing seksi.

#### b.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolian;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. Menyelenggarakan administrasi kepegawain;
- i. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- j. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kecamatan;
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### b.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;



- c. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun laporan keuangan SKPD;
- e. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
- f. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan;
- g. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. Menyusun neraca SKPD;
- i. Mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan badan;
- j. Melaksanakan verifikasi dan perhitungan anggaran badan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **c. Seksi Pemerintahan**

- Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pemerintahan;
  - b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
  - c. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan;
  - d. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan pertanahan di wilayah kecamatan;
  - e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan kecamatan;
  - f. Memfasilitasi pembinaan lembaga-lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
  - g. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan;
  - h. Menyusun dokumen monografi kecamatan;
  - i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU) di wilayah kecamatan;
  - j. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi izin penelitian di wilayah kecamatan;
  - k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup**

- Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;



- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pengawasan rumah sewa/pondokan di wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan pengadmindistrasian dan pelaporan data eks. G.30.S.PKI;
- e. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian C dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- j. Memfasilitasi rapat penyelesaian permasalahan di bidang tramtib, lingkungan hidup dan perizinan lainnya di wilayah kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketenteraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat**
- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di wilayah kecamatan; (Musrenbang)
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan;
- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian yang ada di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melaksanakan pemberian layanan rekomendasi/surat keterangan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memfasilitasi penanganan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial di wilayah kecamatan;
- d. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana di wilayah kecamatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- g. Memfasilitasi rapat sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi program kegiatan usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial di wilayah kecamatan;
- i. Menyusun laporan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### f. Seksi Kesejahteraan Sosial

- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha kecil menengah dan lingkup pertanian di wilayah kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong royong serta pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) di wilayah kecamatan;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan LPM;
- j. Menyusun dokumen kecamatan dalam angka;
- k. Menyusun dokumen profil kecamatan;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan seksi;
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.





#### **g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

#### **2) Fungsi**

Dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4, untuk penyelenggaraan tugas pokoknya, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah kecamatan;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
- j. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan; dan Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **D. Aspek Strategis Organisasi**

Permasalahan pembangunan daerah antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dengan keterbatasan kapasitas keuangan daerah dan karakteristik alokasi belanja daerah, tidak semua penyelenggaraan urusan dapat diprioritaskan dalam satu periode. Namun demikian, tidak berarti bahwa urusan dimaksud tidak diselenggarakan Kecamatan Balikpapan Kota.

9 (Sembilan) Agenda Prioritas untuk Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yaitu :



1. Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengembangkan pemukiman yang sehat dan layak huni menuju pembangunan yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan mutu pendidikan berbasis kompetensi yang berorientasi dunia kerja;
4. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui pengembangan peran serta dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan kota sehat;
5. Membangun sistem infrastruktur, transportasi dan utilitas kota dalam rangka mendukung peningkatan investasi;
6. Memberdayakan masyarakat miskin, UMKM dan memfasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengembangkan pariwisata dan melestarikan ragam budaya;
8. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan pemuda serta mewujudkan kota ramah anak; dan
9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam rangka menjaga kondusifitas kota.

Sejalan dengan Agenda Prioritas Kota Balikpapan Poin 1 (Pertama) "Mengembangkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi" umumnya dan khususnya misi 5 (Lima) "Meningkatkan pelayanan publik dan melaksanakan Reformasi Birokrasi".

#### **E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu strategis Kecamatan Balikpapan Kota yang didasari oleh permasalahan tersebut, yaitu :

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan. Penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pemberian pelayanan kepada masyarakat masih belum optimal. Terutama penguasaan teknologi untuk mengikuti perkembangan teknologi.
2. Masih rendahnya SDM Aparatur.  
Perlunya meningkatkan keterampilan Aparatur Kecamatan Balikpapan Kota dalam rangka pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini dapat dilakukan dengan mengirim Aparatur untuk mengikuti diklat/bimbingan teknis pelayanan, penempatan aparatur sesuai dengan bidang keterampilannya.



3. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan.

Kunci keberhasilan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan adalah komitmen aparatur pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selama ini kinerja birokrasi masih perlu ditingkatkan lagi melalui program dan kegiatan penguatan SDM Aparatur, peningkatan disiplin, peningkatan pelayanan prima, pengembangan organisasi dan tata kerja yang tepat fungsi, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

#### **F. Struktur Organisasi**

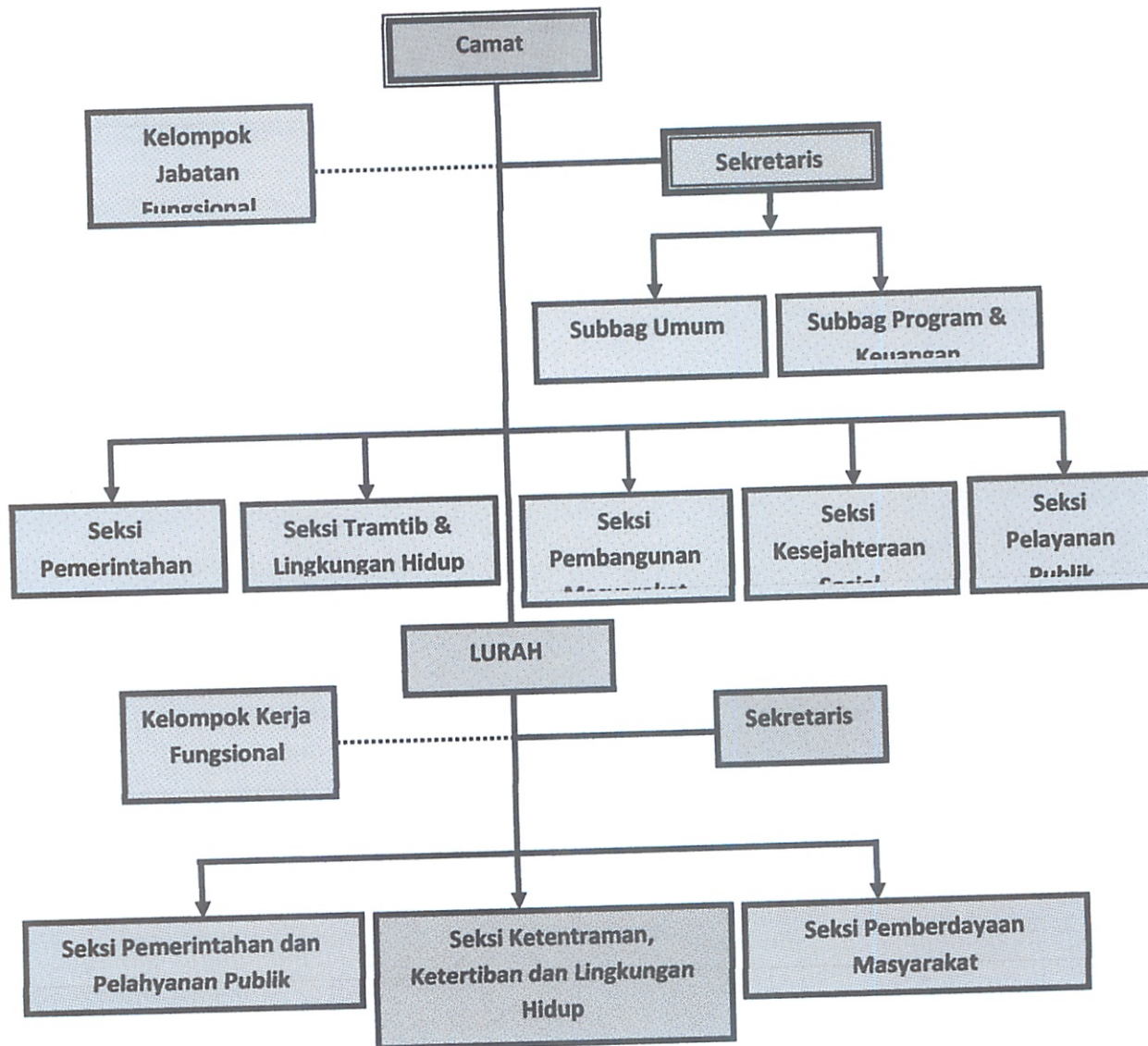
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Kota**

Dasar : Peraturan Walikota Balikpapan  
Nomor : 57 tahun 2016  
Tanggal : 28 Desember 2016



Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan dalam kewenangan dalam lingkup tugas umum Pemerintahan dan kewenangan pemerintah yang diwilayah Kecamatan Balikpapan Kota di tunjang dengan Rincian struktur organisasi sebagai berikut :



- a) Camat  
Pimpinan dan membawahi seluruh Seksi di Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- b) **Sekretariat**  
Dipimpin Sekretaris dan bertanggungjawab lansung kepada Camat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
- c) **Seksi Pemerintahan**  
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggungjawab lansung kepada Camat .
- d) **Seksi Ketentraman, Kertibian dan Lingkungan Hidup**  
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggungjawab lansung kepada Camat.
- e) **Seksi Pembangunan Masyarakat**  
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggung jawab lansung kepada Camat
- f) **Seksi Kesejahteraan Sosial**  
Dipimpin Kepala Seksi dan bertanggungjawab lansung kepada Camat.
- g) **Kelompok Jabatan Fungsional.**  
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat di bagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.



Tabel 1.1

Rincian lengkap SDM yang dimiliki Kantor Kecamatan Balikpapan Kota per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Golongan				Non Golongan	Pendidikan			
	IV	III	II	I		SI/S2	D3/D1	SMA	SMP
Camat	1				1				
Sekretaris		1			1				
Kasi		5			2			3	
Kasubag		2			1			1	
Staf		2	7		2		1	5	1
Honor									
Tenaga Kontrak					15	6	1	8	
Total	1	10	7		15	13	2	17	1



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

#### A.RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Rencana Strategis adalah Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Balikpapan Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2016 – 2021.

#### 1). Visi dan Misi

Visi yang tepat adalah visi yang dapat mengaktualisasikan dengan baik, sehingga mudah dipahami. Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dengan memiliki Visi, arah kegiatan yang harus dilaksanakan menjadi jelas dan terfokus. Sehubungan dengan itu Kecamatan Balikpapan Kota harus mempunyai visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang kemana Kecamatan Balikpapan Kota akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antispatif, dan inovatif. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan tersebut di atas, maka VISI Kecamatan Balikpapan Kota adalah :

**MENJADIKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA YANG BERKUALITAS  
DALAM PELAYANAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN  
PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN GUNA MENDUKUNG  
BALIKPAPAN YANG NYAMAN DIHUNI**



Dalam rangka pencapaian Visi Kecamatan Balikpapan Kota yang telah ditetapkan, maka diperlukan beberapa Misi yang mampu dilaksanakan guna mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi dan tujuan tersebut adalah :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima;
2. Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban;

### 3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

**Tabel**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Mewujudkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban

Tujuan dari Lakip Kecamatan Kota Balikpapan tahun 2018 untuk memberikan gambaran yang jelas , transparan dan dapat dipertanggung jawabkan untuk pencapaian kinerja.

Hal tersebut untuk membantu pimpinan dan seluruh jajaran pegawai Kecamatan Kota Balikpapan dan program ditahun kedepan disusun lebih focus,efektif,efisien, terukur ,transparan serta bisa dipertanggung jawabkan .Selain itu LAKIP bias bermanfaat untuk ; mendorong dan membangun secara baik,meningkatkan kinerja ,serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif ,efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Balikpapan Kota.



Rumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Balikpapan Kota antara lain:

1. Kelancaran pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kecamatan; dan
3. Meningkatkan koordinasi, dukungan dan fasilitasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Perjanjian Kinerja**

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .Petunjuk teknis perjanjian kinerja ,pelaporan kinerja dan tata cara reuiv instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar /dokumen yang berisikan pengusan dari bupati / walikota sebagai pemberi amanah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja.Dalam Perjanjian kinerja maka terwujud komitmen dan kesepakatan antara Bupati / walikota sebagai pemberi amanah dan pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja , hal tersebut berdasarkan tugas,fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya,tanpa mengesampingkan indicator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah yang digunakan menggambarkan dampak dan *Outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator kinerja yang relevan.



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan Kewajiban untuk menjawab secara transparan, mengenai pencapaian kinerja di Kecamatan Balikpapan Kota, dimana pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran. Untuk Pengukuran Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang merupakan penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan capaian Indikator Kerja dengan menggunakan formulir penetapan kinerja. Hasil Evaluasi Kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja

Evaluasi Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Balikpapan Kota Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kecamatan Balikpapan Kota diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

**Tabel 3.1**

**Tabel Pengukuran Kinerja**

No.	Kategori	Nilai Angka	Intrepretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Sumber : PermenPAN 12 Tahun 2015



### 3) PERJANJIAN KINERJA

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan publik	Nilai IKM	85.88%
		Persentase Kelurahan yang ditindaklanjuti	100%
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadaya masyarakat	Rp. 1.839,349,750

NO.	Program	Anggaran ( Rp )	Keterangan
1	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	552.950.000,-	APBD
2	Program Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	3.046.700.000,-	APBD
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	41.200.000,-	APBD
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	116.332.853,-	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.757.182.835,-</b>	<b>APBD</b>



## E . KEBIJAKAN CAMAT BALIKPAPAN KOTA

### 1. Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria arah kebijakan adalah sebagai berikut : memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat, membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran kecara lebih rasional, mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan peraturan perundang undangan.

**Tabel 4.3**  
**Strategi dan Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Mengembangkan kualitas pelayanan masyarakat	Peningkatan peran dan fungsi kecamatan dan kelurahan
		presentase keluhan yang ditindaklanjuti		
Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	Jumlah swadana masyarakat	Memperkuat fasilitasi kerjasama dengan lembaga/ormas	Peningkatan koordinasi wilayah

**Tabel**  
**Sesuai Renstra Thn 2017**

No	uraian	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
	Pembinaan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT	Jumlah RT yang mendapat bantuan operasional	227 RT	2.040.750.000	226 RT
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD dan Daerah</b>	<b>100%</b>		
	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	5 usulan	15.000.000	5 USULAN
	Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan	Jumlah usulan prioritas bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya	108 suara	35.758.200	47 USULAN
	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>Persentase peserta yang lolos ke tingkat Kota</b>	<b>100%</b>		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tk. Kecamatan dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota	Jumlah cabang lomba yang diikuti	7 lomba	15.000.000	7 LOMBA
	<b>Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Persentase jumlah RT yang mendapatkan bantuan dana SPGRM dan persentase kehadiran peserta PKK</b>	<b>100%</b>		
	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat (PKK) Tk. Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Kegiatan)	3 kegiatan	29.800.000	14
		Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan keagamaan Masyarakat (Kegiatan)	4 kegiatan		
	Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Dalam Pembinaan Lembaga Masyarakat (PKK) Tk. Kelurahan	Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Kegiatan)	55 kegiatan		
		Jumlah Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan keagamaan Masyarakat (Kegiatan)	24 kegiatan	108.931.100	
	Partisipasi Masyarakat untuk Ikut Serta dalam Kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan	Jumlah luas jalan lingkungan terbangun (m')			3.530
		Jumlah drainase lingkungan terbangun (m')	30 RT	244.405.000	1.202
		Jumlah luasan bangunan terbangun (m2)			343

<b>Prog.Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.352.335.650</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Penggunaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayar dalam 1 tahun (rekening)	20 rekening	217.215.482	20
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan R4 dan STNK Kendaraan R2 dalam 1 tahun (unit )		8.748.400	34
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penggunaan Bahan Peralatan Kebersihan kantor (jenis)		68.802.000	26
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah ATK yang digunakan untuk kegiatan Administrasi (jenis )		188.969.360	69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (Jenis)		98.696.600	21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor (Jenis)		42.589.100	8
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi pegawai selama setahun		270.250.000	116
Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	jumlah pegawai yang melaksanakan rapat-rapat koordinasi keluar dan kedalam daerah		391.321.139	94
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	jumlah pegawai non PNS Kecamatan Balikpapan Kota		2.698.571.500	53
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Kelayakan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>73%</b>		
Penyediaan/Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang disewa	-	198.050.000	1 UNIT
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor		69.353.000	8
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	-	87.736.957	34

Tabel 3.2  
Sasaran Strategis 1 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	a. Jumlah buku dokumen profil	15	6	40
		b. Jumlah dokumen buku kecamatan dalam angka	-	-	-
		c. Jumlah dokumen LAKIP	2	2	100

Tabel 3.3  
Sasaran Strategis 2 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	a. Jumlah IMTN yang diterbitkan	600	374	62
		b. Jumlah KTP yang dicetak	9.000	9.553	106
		c. Jumlah KK yang dicetak	8.000	10.186	127
		d. Jumlah Dispensasi Nikah yang terbit	100	61	61
		e. Jumlah Pernyataan Ahli waris yang terbit	250	245	98

Tabel 3.4  
Sasaran Strategis 3 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	a. Jumlah peserta lomba MTQ	50	41	82
		b. Jumlah peserta lomba administrasi RT	5	5	100
		c. Jumlah peserta lomba Kelurahan	5	5	100
		d. Jumlah peserta diklat aparat	3	3	100

Tabel 3.5  
Sasaran Strategis 4 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	a. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Fisik	100	80	80
		b. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Sosial Budaya	30	26	87
		c. Prosentase persetujuan usulan MUSRENBANG bidang Ekonomi	5	2	40
		d. Frekuensi Kerja Bakti Massal	3	3	100
		e. Jumlah pengadaan bibit tanaman	110	110	100
		f. Jumlah bank sampah	11	11	100
		g. Jumlah peserta lomba CGH	10	10	100
		h. Jumlah pelaksanaan monitoring kebersihan	12	12	100

Tabel 3.6  
Sasaran Strategis 5 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Jumlah angka kriminalitas	12	6	50
		b. Jumlah operasi/razia KTP yang terjaring	150	84	56
		c. Jumlah operasi/razia miras yang terjaring	1.500	923	62
		d. Jumlah operasi/razia PKL yang terjaring	25	17	68

Tabel 3.7  
Sasaran Strategis 6 :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	a. Jumlah Posyandu	226	230	102
		b. Jumlah peserta lomba Posyandu	5	5	100
		c. Jumlah peserta lomba bayi dan balita sehat	30	30	100
		d. Jumlah peserta lomba sekolah sehat	30	22	73
		e. jumlah peserta kader dan lomba keluarga harmonis	5	5	100
		f. Jumlah peserta lomba kader PHBS dan kader Jumantik	5	5	100

Tabel 3.22  
Realisasi Anggaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Anggran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase Kualitas pelayanan Administrasi Perangkat Daerah ( Target Outcome = 85 % )				<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.352.335.650	3.095.910.135	71,13
		Jumlah rekening telepon, listrik, air dan internet yang di bayarkan ( jenis )	100			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air , listrik	343.200.000	217.251.482	63,3
		Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang disediakan ( jenis )	16			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	20.000.000	8.748.400	43,74
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan ( jenis )	67			Penyediaan jasa kebersihan	70.357.050	68.802.000	97,79
		Jumlah Barnag dan Pengadaan kantor ( Jenis )	7			Penyediaan Alat tulis Kantor	27.189.600	188.969.360	69,5
		Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.625.600	98.696.600	98,08
		Jumlah tersedianya nasi kotak /snack /Baunket untuk kegiatan dan rapat pegawai dan peserta ( org )	34			Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	43.370.500	42.589.100	98,2
		Jumlah pegawai yang ditugaskan melaksanakan Rapat -rapat koordinasi , konsultasi dalam dan luar Daerah ( org )	70			Penyediaan makanan dan minuman	391.065.000	270.250.000	69,11
		Jumlah tennaga non PNS yang mendapatkan upah dalam 1 thn ( org )	20			Rapat - rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	413.250.000	391.321.139	94,69
		Jumlah Pegawai kecamatan yang mendapatkan tunjangan ekinerja				Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	2.698.571.500	1.809.282.054	99,18
		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor ( jenis )	8			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	1			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /oprasional	88.323.350	87.736.957	99,34
		Jumlah rumah jabatan dinas camat	1			Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	70.517.500	69.353.000	98,35
		Telah Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Prapatan				Penyediaan /sewa Gedung Kantor	199.250.000	198.050.000	99,4
		Telah Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Telaga Sari				<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
		Telah Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Klandasan ulu				Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Prapatan	25.000.000	18.880.000	0
		Telah Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Ilir				Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Telaga Sari	25.000.000	22.600.000	15
	Telah Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai				Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan klandasan Ulu	25.000.000	21.390.000	7,8	
					Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan klandasan ilir	25.000.000	22.587.500	22,2	
					Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PKK Kelurahan Damai	25.000.000	23.473.600	22,5	
				Fasilitas, monitoring, evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan ( PKK ) Kecamatan Balikpapan Kota	30.000.000	29.800.000	6,5		
				Partisipasi Masyarakat Untuk ikut Serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Prapatan	50.000.000	49.856.000	1,4		
				Partisipasi Masyarakat Untuk ikut Serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Telaga Sari	50.000.000	44.870.000	0		
				Partisipasi Masyarakat Untuk ikut Serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan ulu	50.000.000	49.937.000	1,2		
				Partisipasi Masyarakat Untuk ikut Serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan ilir	50.000.000	49.982.000	4,2		
				Partisipasi Masyarakat Untuk ikut Serta dalam kegiatan Pembangunan Lingkungan Kelurahan Klandasan Damai	50.000.000	49.760.000	1,4		
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, ketentraman dan ketertiban	<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>			<b>Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan</b>	2.043.000.000	2.040.750.000	99,89		
	Telah terlaksananya penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kluarahaan Prapatan			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Prapatan	342.000.000	342.000.000	100		
	Telah terlaksananya penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kluarahaan Telaga Sari			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Telaga sari	423.000.000	423.000.000	100		
	Telah terlaksananya penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kluarahaan ulu			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan klandasan ulu	378.000.000	378.000.000	100		
	Telah terlaksananya penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kluarahaan ilir			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan klandasan ilir	558.000.000	558.000.000	100		

		Telah terlaksannya penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kluarahaan Damai			Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT Kelurahan Damai	342.000.000	342.000.000	99,34
		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	7		<b>KEBUDAYAAN</b>			
			100		<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>			
			100		Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi Tilawtil Qur'an Kecamatan Balikpapan Kota	15.000.000	15.000.000	100
			100		<b>PERENCANAAN</b>			
			100		Penyelenggaraan Musrembang kecamatan Balikpapan Kota	15.000.000	15.000.000	100
			100		Penyelenggaraan Musrembang kecamatan Prapatan	7.500.000	6.595.000	91,67
			100		Penyelenggaraan Musrembang kecamatan Telaga Sari	7.500.000	7.500.000	100
			100		Penyelenggaraan Musrembang kecamatan Klandasan ulu	7.500.000	7.325.500	97,67
			100		Penyelenggaraan Musrembang kecamatan klandasan ilir	72.800.000	6.595.000	90,59
			100		Penyelenggaraan Musrembang kecamatan Damai	7.500.000	7.462.200	99,5
1	Pendapatan					9.089.520.100	5.940.634.392	82,22
2,1	Belanja Tidak Lansung					891.852.000		
2,2	Belanja Lansung					5.516.810.500		

**Tabel 3.20**  
**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	70	77,46	22,54
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	91	88,28	11,72
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	95,5	91,03	8,97
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	88,3	94,12	5,88
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	58,9	95,04	4,96
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	95,9	96,82	3,18

Tabel 3.20  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya bahan bacaan, data kecamatan dalam angka, profil kecamatan, data rencana pembangunan dan peraturan perundang – undangan.	70	77,46	22,54
2	Terciptanya pelayanan yang mudah, cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku	91	88,28	11,72
3	Terciptanya sumber daya manusia yang bersih dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang cakap dan terampil serta terbinanya kebersamaan dan kekeluargaan	95,5	91,03	8,97
4	Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan yang bersih, indah dan nyaman	88,3	94,12	5,88
5	Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku	58,9	95,04	4,96
6	Peningkatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera	95,9	96,82	3,18